

Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Kabupaten Bandung Dalam Pelaksanaan “Program Kabupaten Bandung Layak Anak”

Aria Andika Subagja

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas Pasundan Bandung, ariaandika222@gmail.com.

Ali Anwar

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas Pasundan Bandung, Alianwaryusufi5@gmail.com

Uga Pratama Gunawan

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas Pasundan Bandung, Alianwaryusufi5@gmail.com

Abstract

Recently, decision-making regarding children's right to participate has become a major focus in development policies and programs in various regions of Indonesia. One significant initiative in this regard is the "Child-Friendly Regency" (Kabupaten Layak Anak or KLA) program implemented in Bandung Regency through the Children's Forum. This study employs a qualitative method, combining literature review and empirical study, to examine the fulfillment of children's right to participate through the Bandung Regency Children's Forum in the implementation of the Child-Friendly Regency Program. Data was collected through observations, interviews, and relevant literature analysis. The study involved the management of the Children's Forum, the head of the Children's Forum, and the head of the section for children's rights fulfillment in Bandung Regency. The results indicate that Bandung Regency is committed to becoming a Child-Friendly Regency, with various initiatives to involve children in decision-making processes. The Children's Forum serves as an essential platform for children's participation, allowing them to contribute to development planning. However, challenges such as limited funding, a lack of

Author correspondence email: addressauthor@mail.ac.id

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>

Copyright (c) 2024 by Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial



stakeholder understanding, and geographical constraints hinder the program's implementation. To address these challenges, the Bandung Regency government has implemented strategies such as data analysis, the establishment of children's forums at the sub-district and village levels, and intensive socialization to increase understanding of children's participation rights. Cross-sector cooperation with businesses, NGOs, mass media, and academics is also crucial to support the success of the KLA program.

Keywords:

Children's Rights Fulfillment, Child Participation, Child-Friendly Regency.

Abstrak

Baru-baru ini pengambilan keputusan dalam hak partisipasi anak semakin menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan program pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah program "Kabupaten Layak Anak" (KLA) yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung melalui Forum Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan studi pustaka dan studi empiris untuk mengkaji pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak (KLA). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis literatur yang relevan. Studi ini melibatkan pengurus FAD, ketua FAD, dan kepala seksi pemenuhan hak anak Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung telah berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak, dengan berbagai inisiatif untuk melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan. Forum Anak Daerah berfungsi sebagai platform penting bagi partisipasi anak-anak, memungkinkan mereka berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman stakeholder, dan kendala geografis yang menghambat implementasi program ini. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Bandung telah menerapkan strategi seperti analisis data, pembentukan forum anak di tingkat kecamatan dan desa, serta sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang hak partisipasi anak. Kerjasama lintas sektor

dengan dunia usaha, LSM, media massa, dan akademisi juga penting untuk mendukung keberhasilan program KLA..

Kata Kunci

Pemenuhan Hak Anak, Partisipasi Anak, Kabupaten Layak Anak

Pendahuluan

Baru-baru ini di abad 21, isu mengenai partisipasi anak dalam pengambilan keputusan semakin menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan program pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. (Putra, 2024) Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah program "Kabupaten Layak Anak" (KLA) yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung melalui Forum Anak. (Lastriana, 2021) Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak, khususnya hak partisipasi, terpenuhi dan diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. (Ramadhita & Roychansyah, 2023) Program Kabupaten Layak Anak merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi perkembangan anak, di mana salah satu komponen utamanya adalah memastikan partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup anak. (Mayasari & Bahri, 2022) Forum Anak berfungsi sebagai platform bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, dan masukan mereka terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. (Sumanda, 2024) (Reason) Partisipasi anak diakui sebagai hak fundamental berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB, khususnya pada Pasal 12 yang menekankan hak anak untuk didengar dan diperhitungkan dalam keputusan yang mempengaruhi anak. (Pramono, 2022) Implementasi hak Forum Anak ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dan berarti dalam proses pembangunan di daerah mereka. (E. A. Rizki et al., 2020) Partisipasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan anak. (Naibaho & Siregar, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat di Lumajang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam Forum Anak telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. (Lawado & Naimah, 2017) Menurut laporan yang diterbitkan oleh UNICEF, keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan anak-anak terhadap isu-isu yang mempengaruhi mereka langsung. (UNICEF, 2017) Selain itu, riset yang dilakukan oleh World Vision International mengungkapkan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam forum-forum

seperti ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, dan pemahaman mereka tentang proses demokrasi. (Hakim, 2019)

Meskipun manfaat dari partisipasi anak dalam Forum Anak terlihat jelas, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. (Raafiah et al., 2024) Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari beberapa pihak dewasa yang masih meremehkan kapasitas anak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan penting. (Lickona, 2022) Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal sumber daya dan logistik untuk memastikan partisipasi anak dapat dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu contohnya adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk mendukung program partisipasi anak secara merata di seluruh wilayah. Hal ini bisa berdampak pada kualitas dan jangkauan program tersebut. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, anggaran yang dialokasikan untuk KLA hanya sekitar Rp1,3 miliar atau 22,87% dari APBD. Hal ini dapat membatasi jangkauan dan kualitas program KLA di seluruh wilayah Bandung. (H. K. Bandung, 2023) Selain itu, meskipun ada berbagai program untuk meningkatkan fasilitas ramah anak seperti Puskesmas Ramah Anak dan pembangunan ruang publik untuk anak di berbagai kelurahan, keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama dalam memastikan semua anak di Bandung mendapatkan manfaat yang merata. (Raya, 2023)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pelaksanaan Forum Anak. (Roza & S, 2018) Ini termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anak-anak serta pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya partisipasi anak. Selain itu, dukungan finansial dan teknis juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program KLA. (Darsal Zulfakar Dafid et al., 2024)

Implementasi program "Kabupaten Layak Anak" melalui Forum Anak di Kabupaten Bandung merupakan langkah progresif dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, program ini tidak hanya memperkuat hak-hak anak tetapi juga menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat.

Pemenuhan hak partisipasi anak dalam pengambilan keputusan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. (Nadilla, 2019; Ulum & Anggaini, 2020) Berdasarkan hasil penelitian dari Arifin Ambarita (2019) menunjukkan bahwa

partisipasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan hak anak dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional anak sehingga anak merasa dihargai dan memiliki kontrol atas aspek-aspek tertentu dalam hidup, hal ini berpengaruh penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan.

Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa manfaat signifikan. Menurut hasil penelitian dari Ulfamadani (2023) menunjukkan bahwa partisipasi anak tidak hanya mempromosikan pengembangan individu anak, tetapi juga meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh otoritas dewasa. Selain itu, Nurida (2024) juga menyatakan bahwa keterlibatan anak di provinsi Aceh dalam proses politik dalam hal ini termasuk pengambilan pendapat dan partisipasi hak anak, dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Menurut Vita Putri Oktaviani & Riswanda (2024) hal ini berarti bahwa program Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi mereka secara langsung.

Studi yang dilakukan oleh UNICEF dalam (Octarra et al., 2022) menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung telah membawa dampak positif dalam beberapa aspek, seperti peningkatan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, dan pemahaman tentang proses demokrasi di kalangan anak-anak. D. A. Rizki et al., (2015) juga menemukan bahwa partisipasi anak dalam forum-forum semacam ini membantu meningkatkan kesadaran anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya dalam konteks lokal.

Meskipun terdapat banyak bukti yang mendukung manfaat partisipasi anak, terdapat beberapa tantangan dan kesenjangan dalam literatur yang perlu diperhatikan. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya penelitian yang mendalam tentang bagaimana perbedaan konteks budaya dan sosial mempengaruhi efektivitas hak partisipasi anak. (Faturrohman & Herlina, 2024) Sebagian besar literatur penelitian yang ada berfokus pada konteks negara-negara Barat, sementara penelitian tentang partisipasi anak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas khususnya di Bandung.

(Signifikansi Riset) Penelitian ini penting untuk mengevaluasi bagaimana Forum Anak dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan ramah anak di tingkat lokal.

·
·
Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari studi pustaka, dan studi empiric. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Sedangkan melalui studi empiris, peneliti dapat mengumpulkan data primer yang spesifik dan relevan dengan konteks lokal. Melalui observasi, wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung sehingga mengurangi keraguan dalam keakuratan penelitian ini. Melalui observasi secara partisipatif, peneliti akan mendapatkan gambaran data yang bisa dinilai masuk ke dalam katagori penelitian. Melalui wawancara peneliti akan mendapatkan sebuah data informasi mengenai pengalaman praktis atau pengetahuan yang dimiliki oleh responden, bukan hanya itu bahkan peneliti mendapatkan data berupa pendapat dan juga harapan dari responden terkait dengan hak partisipasi anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini diaplikasikan dalam studi pustaka dan studi empiris, yang mana bernilai positif bagi peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif melalui analisis mendalam dari berbagai sumber dan data primer yang relevan. Kombinasi metode ini membantu dalam mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menjelaskan berbagai aspek dari topik yang diteliti secara lebih holistik dan kontekstual. (Creswell, 2015)

Adapun dalam melakukan penelitian, waktu yang ditempuh peneliti adalah 2 bulan. Waktu ini digunakan peneliti untuk mencari sumber data berupa data lapangan.

Dalam pengambilan sumber data peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengkatagorikan sebagai berikut :

1. Orang yang berpengalaman dalam organisasi hak partisipasi anak.
2. Orang yang memiliki keahlian dalam forum hak partisipasi anak seperti komunikasi, kepemimpinan dan keahlian teknis.
3. Orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan forum dan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi aktif.

Dari ketiga katagori di atas didapatkan bahwa ada 3 yang memenuhi katagori tersebut yakni pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung, ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dan kepala seksi pemenuhan hak anak di kabupaten Bandung. Adapun pengurus forum anak bandung berjumlah 3 orang, yakni Arini, Raisah dan Nabila. Adapun nama ketua Forum Anak Daerah

Kabupaten Bandung yakni Herdiyanto dan kepala seksi pemenuhan anak di kabupaten Bandung yakni Aniek Febriani.

Penelitian ini menggunakan beberapa strategi dalam memvalidasi data , yaitu : 1) Triangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. 2) Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian. 3) Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan/ partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. 4) Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. 5) Masukan, asupan atau *feedback* merupakan sebuah cara untuk mendapatkan masukan, saran, kritik, dan komentar dari orang lain. Semua itu sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias, dan asumsi peneliti, serta kelemahan-kelemahan logika peneliti yang sedang dilakukan. Analisis data kualitatif ini adalah sebagai upaya menggali pemahaman mendalam tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti dari sudut pandang yang kompleks dan kontekstual. (Lexy J. Meleong, 2006)

. Dalam analisa data penulis menggunakan enam langkah analisis pada model ini, yaitu: 1) Mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini melibatkan interaksi dengan cara wawancara, menscanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan sumber informasi. 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 3) Memulai coding semua data. Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan pertolongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas (Rossman et al., 2012)Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambaran yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus. 4) Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang dianalisis.(Rossman et al., 2012)

Penulis menggunakan metode ini sebagai upaya dalam mendapatkan informasi mengenai orang, lokasi, atau peristiwa data setting (ranah) tertentu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnologi, atau naratif. Setelah itu terapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. 1) Pendekatan paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini biasanya meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu. 2) Interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil semua? akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan. (Creswell, 2015)

Pelajaran ini melibatkan interpretasi pribadi peneliti, yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman pribadinya. Proses coding membantu peneliti menemukan inti informasi dari informan, memudahkan interpretasi informasi yang telah diselesaikan atau disortir selama proses coding.

Hasil Penelitian

1. Bandung Kabupaten Layak Anak

Di tahun 2024, Kabupaten Bandung telah dicanangkan sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia, sebuah status yang menandakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lingkungan di kabupaten ini tidak hanya mendukung, tetapi juga memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prestasi yang didapatkan oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Bandung dalam program ini contohnya : UPTD Puskesmas Garuda sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 2023 dan RSUD Bandung Kiwari sebagai Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak 2023. (D. Bandung, 2024) Prestasi dari instansi ini menunjukkan bahwa langkah ini tidak hanya berfokus pada saat ini, tetapi juga telah dipersiapkan dengan tempo yang lama dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak di masa depan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah memulai persiapan dalam membangun infrastruktur dan kebijakan yang berorientasi pada anak-anak, dengan memasukkan suara dan perspektif mereka sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Adapun salah satu inisiatif yang penting dalam upaya dalam pemenuhan hak partisipasi anak adalah pendirian Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung (FAD Kabupaten Bandung). (D. A. Rizki et al., 2015) Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung (FAD) ini bertujuan sebagai wadah partisipasi anak-anak untuk aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan di kabupaten Bandung. (Cindy

Ramadhani Wijaya, 2022) Hal ini termasuk dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. Melalui Forum Anak, anak-anak di Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh anggota forum, diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Partisipasi mereka tidak hanya sekadar formalitas, tetapi mereka juga memiliki peran nyata dalam merumuskan kebijakan dan mengemukakan aspirasi untuk pembangunan yang lebih baik.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan partisipasi anak masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. (Suharto, 2015) Salah satu masalah utama adalah bahwa partisipasi anak masih seringkali terbatas pada tingkat formalitas belaka. Anak-anak belum sepenuhnya diberikan kesempatan, ruang, dan waktu yang memadai untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan suara mereka dengan bebas. (Hastira, 2024; Rahma, 2024). Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak dewasa, terutama di kalangan organisasi perangkat daerah. (Dewi Septriana Kumalasari, 2024) Mengenai pentingnya partisipasi anak dan peran Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam implementasi program tersebut.

Tantangan lainnya termasuk kurangnya penyebaran Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Desa di seluruh Kabupaten Bandung, serta kebutuhan akan fasilitas khusus seperti sekretariat dan dukungan dana yang masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan AF dari KSPHA mengemukakan bahwa :

"Ya untuk saat ini di Indonesia Forum Anak yang sudah dibentuk ada di 34 provinsi, 458 kabupaten, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa di Indonesia. Sedangkan kalau untuk total Provinsi di Indonesia kan ada 38 jadi ya belum di semua provinsi ada maupun kabupaten atau kecamatan atau desa.."

Adapun menurut H dari ketua KFADKB mengemukakan bahwa :

"Ya kenapa kok bisa begitu karena ya ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak, keterbatasan sumber daya dan dana, serta tantangan dalam mengimplementasikan program ini secara merata di seluruh wilayah."

Sejalan dengan hal ini , maka A dari PFAB juga menjelaskan bahwa

"Ya, hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak, keterbatasan sumber daya dan dana, serta tantangan dalam mengimplementasikan program ini secara merata di seluruh wilayah. Tantangan-tantangan ini menjadi penghambat utama

bagi upaya kami dalam membentuk Forum Anak di setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa di Indonesia."

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF dari KSPHA, H dari ketua KFADKB, dan A dari PFAB dapat diidentifikasi bahwa AF dari KSPHA menyatakan bahwa Forum Anak sudah dibentuk di 34 provinsi, 458 kabupaten, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa. Namun, ini menyisakan 4 provinsi yang belum memiliki Forum Anak. H dari KFADKB dan A dari PFAB mengidentifikasi beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya dan dana, serta tantangan implementasi. Adapun R dari PFAB menanggapi mengenai keterbatasan dana yang mengemukakan bahwa :

"Keterbatasan dana juga menjadi kendala signifikan. Misalnya, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa seringkali sangat minim. Ini mengakibatkan terbatasnya jumlah kegiatan yang bisa dilakukan dan kurangnya fasilitas pendukung seperti sekretariat dan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan anak-anak"

Sejalan dengan hal ini N dari PFAB juga menjelaskan bahwa :

"Di lapangan, kami juga menghadapi tantangan geografis. Kabupaten Bandung memiliki banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga penyebaran informasi dan pelaksanaan program menjadi tidak merata. Ada desa-desa yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program KLA karena akses yang sulit dan minimnya transportasi, nah dari minimnya transportasi ini juga kendala bagi dana karena dana yang terbatas juga susah untuk dapat transportasi"

Adapun menurut A dari PFAB menjelaskan bahwa :

"kurangnya dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi kendala. Padahal, keterlibatan mereka bisa sangat membantu dalam hal pendanaan dan penyediaan fasilitas. Kami masih perlu lebih banyak advokasi untuk meyakinkan sektor swasta tentang pentingnya kontribusi mereka dalam program KLA."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Keterbatasan dana membatasi jumlah dan kualitas kegiatan yang bisa dilaksanakan. Tantangan geografis memperparah situasi dengan sulitnya menjangkau daerah terpencil. Selain itu, kurangnya dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta menambah beban karena potensi bantuan pendanaan dan fasilitas dari sektor ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Upaya advokasi dan kerjasama lintas sektor diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan program KLA di Kabupaten Bandung. Sedangkan

secara spesifik, di kabupaten Bandung terdapat 31 kecamatan dan 280 desa/kelurahan, yang mana belum terdapat di seluruh wilayah di kabupaten Bandung. (Sumiaty, 2021) Pemahaman yang belum cukup dari para stakeholder seperti Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Akademisi juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. Hal ini dibuktikan dengan Survei yang menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman dan keterlibatan para stakeholder dalam program KLA. (Darmayanti & Lipoeto, 2020) Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, survei yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak stakeholder, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, dan akademisi, masih kurang memahami dan terlibat dalam program KLA. Rendahnya pemahaman ini tercermin dalam laporan yang mencatat bahwa kurangnya advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode, dan teknologi adalah kendala utama dalam pelaksanaan program KLA di Kabupaten Bandung. (KLA Bandung, 2024)

Adapun upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dilakukan melalui strategi yang telah diimplementasikan oleh bidang perlindungan anak Kabupaten Bandung. Sebagaimana penjelasan dari N dari PFAB yang mengemukakan bahwa:

"Kami telah melakukan implementasi beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu langkah pertama yang kami lakukan adalah analisis data dari Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung. Dengan menganalisis data ini, kami dapat memahami lebih baik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anak-anak di berbagai wilayah. "Dari analisis data, kami menemukan bahwa partisipasi anak-anak di beberapa wilayah masih sangat rendah, terutama di daerah terpencil. Hal ini mendorong kami untuk memperluas jangkauan dengan membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, lebih banyak anak dapat terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan dan proses pengambilan keputusan."

Dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA). Langkah pertama yang diambil adalah melakukan analisis data dari Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung. Melalui analisis ini, mereka dapat memahami lebih baik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anak-anak di berbagai wilayah.

Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa partisipasi anak-anak di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, masih sangat rendah. Untuk mengatasi hal ini, langkah konkret yang diambil adalah memperluas jangkauan partisipasi dengan membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa. Dengan pembentukan forum ini, lebih banyak anak dapat terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan dan proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam program KLA.

Adapun mengenai upaya proses pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa yang ada di Bandung A dari PFAB menjelaskan bahwa :

"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat untuk membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa. Kami juga melibatkan sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat setempat untuk mendukung pembentukan dan operasional forum anak ini. Selain itu, kami memberikan pelatihan kepada para fasilitator dan anggota forum agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik."

Adapun untuk upaya mengetasi kurangnya pemahaman tentang partisipasi anak yang ada di kabupaten Bandung yang mana terdapat tantangan mengenai letak geografis, R dari PFAB mengemukakan bahwa :

"Kami telah melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang hak partisipasi anak. Kami mengadakan berbagai workshop, seminar, dan kampanye di media sosial untuk mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya partisipasi anak. Selain itu, kami juga melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan bahwa informasi ini sampai ke seluruh penjuru Kabupaten Bandung"

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa upaya yang dilakukan mencakup pembentukan dan pengoperasian forum anak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, pelatihan untuk fasilitator, sosialisasi intensif, dan pendekatan langsung ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dengan demikian, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memenuhi hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung merupakan langkah yang positif dan berpotensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. Dengan terus mendorong partisipasi yang aktif dan menyeluruh dari anak-anak dalam semua aspek kehidupan publik, Kabupaten Bandung berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berpihak pada anak-anak, serta

memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

2. Alur penyelenggaraan Kabupaten Bandung Layak Anak

Dalam hal ini terapat implikasi praktik dan teoritis pekerja sosial dalam pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. Pekerja sosial merupakan suatu profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan. Pekerja sosial juga merupakan suatu profesi pelayanan sosial yang mempunyai tujuan untuk mencegah serta memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pendampingan, mediasi, dan advokasi, untuk rehabilitasi dikembalikan ke berbasis seperti berbasis keluarga dan berbasis masyarakat, karna tidak sepenuhnya pekerja sosial dapat menyentuh langsung ke bawah secara maksimal harus ada kerjasama dari semua *leading sector* agar bisa memperkuat mulai dari tingkat keluarga sampai ke tingkat masyarakat karna semua bertanggung dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak.

Peran pekerja sosial diantaranya memberikan aksesibilitas ke sistem sumber atau pihak-pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah anak, memberikan bimbingan sosial berperan sebagai konselor memberikan masukan-masukan terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan memberikan advokasi atau pembelaan bagi anak yang menjadi korban ketidakadilan.

Alur pikir menggambarkan bagaimana faktor-faktor pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. KLA merupakan Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagaimana peraturan bupati Bandung nomor 46 tahun 2014 yang menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bandung mengamanatkan bahwa Program Kabupaten Bandung Layak Anak merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan yang menintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak. Kabupaten

Bandung dapat dikategorikan sebagai Kabupaten Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

Indikator terpenting dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak adalah partisipasi anak. Partisipasi anak bertujuan agar pembangunan yang di hasilkan memiliki kualitas dan manfaat pembangunan yang bisa dirasakan oleh anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Partisipasi anak seperti keterlibatan anak dalam proses pembangunan dan sebagai pelopor dan pelapor yang diwadahi oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung. Pemenuhan hak anak khususnya partisipasi anak dan perlindungan khusus anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada peran dari berbagai *stakeholder* seperti organisasi perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa dan akademisi sebagai faktor pendorong dan pendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak.

Pembahasan

1. Bandung Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Bandung telah dicanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Yohana (, 2018) yang berada di kabupaten Siak provinsi Riau yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan secara berkesinambungan. Penelitian Nova Yohana menyoroti pentingnya kebijakan pro-anak dalam memberikan dampak positif bagi anak-anak, khususnya dalam menghadapi tantangan akses terhadap layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan.

Dengan adanya pencanangan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bandung berupaya menetapkan standar dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Ini mencakup upaya untuk membangun infrastruktur yang ramah anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, dan memberdayakan komunitas lokal untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung (FAD Kabupaten Bandung) merupakan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan. Forum ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan. Menurut hasil penelitian dari Riyanto & Kovalenko

(2023) dapat diketahui bahwa pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan lokal melalui forum-forum anak. Studi ini menunjukkan bahwa forum-forum partisipasi hak anak bukan hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil tetapi juga memberdayakan anak-anak untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Sejalan dengan hasil penelitian dari Jaenudin (2024) menunjukkan bahwa dengan melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, forum-forum anak membawa perspektif unik yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang dewasa. Partisipasi anak dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan relevan bagi kebutuhan anak-anak secara spesifik.

Meskipun ada upaya untuk melibatkan anak-anak, masih ada tantangan signifikan seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman dari para stakeholder, dan kendala geografis yang mempengaruhi pelaksanaan program KLA di seluruh Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan strategi seperti analisis data untuk memahami tantangan yang dihadapi anak-anak, memperluas jangkauan partisipasi dengan membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa, serta melakukan sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang hak partisipasi anak. Menurut hasil penelitian dari Lukman (2018) menunjukkan bahwa strategi analisis data yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi anak-anak dapat memandu pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Lukman juga menyarankan pendekatan yang inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk meningkatkan hasil program Kabupaten Layak Anak. Sejalan hal ini, penelitian dari Nuriawati et al., (2024) juga menjelaskan bahwa Melibatkan semua pihak ini tidak hanya memperluas sudut pandang dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan anak-anak secara holistik, serta memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal anak-anak

Dalam mengatasi tantangan program Kabupaten Layak Anak diperlukan pendekatan lintas sektor yang holistik. Pendekatan ini melibatkan advokasi intensif kepada sektor swasta untuk mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Haq (2017) yang menunjukkan bahwa sektor swasta dapat berperan penting dengan menyediakan dana, fasilitas, dan sumber daya lainnya yang

mungkin tidak sepenuhnya tersedia melalui anggaran pemerintah. Kolaborasi dengan perusahaan lokal, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas program dan memastikan keberlanjutan inisiatif yang sudah berjalan. Selain itu, menurut hasil penelitian dari Rahman et al. (, 2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dapat mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dan memperkuat jaringan dukungan untuk kesejahteraan anak. Pendekatan lintas sektor ini memastikan bahwa program Kabupaten Layak Anak dapat mengatasi tantangan seperti keterbatasan dana dan fasilitas dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkelanjutan untuk perkembangan anak-anak di Kabupaten Bandung.

2. Alur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Alur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah proses atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang ramah anak, yaitu sebuah kabupaten yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. (Hamudy, 2015)

Dalam penelitian ini, pekerja sosial melakukan pendampingan yang melibatkan keluarga dan komunitas. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keluarga lebih efektif dalam jangka panjang karena anak-anak mendapatkan dukungan yang konsisten dari orang-orang terdekat mereka. hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nur Jaya Indra (2019) yang menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial secara efektif membantu anak-anak dalam memahami dan mengklaim hak-hak mereka. Mediasi yang dilakukan oleh pekerja sosial juga berhasil meredakan konflik yang melibatkan anak-anak, menunjukkan pentingnya peran mediasi dalam program KLA

Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung menyediakan platform bagi anak-anak untuk terlibat dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi anak dalam forum ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan pembangunan tetapi juga memberi anak-anak rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas komunitas mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Niken Irmawati (2009) bahwa keterlibatan anak dalam proses pembangunan di Kota Surakarta menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Keberhasilan program KLA tidak lepas dari kerjasama antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, media massa, dan

akademisi. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara anak-anak dan berbagai pihak ini, memastikan bahwa hak-hak anak diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil. sejalan dengan hal ini (Arifina & Afrilia, 2023) juga menemukan bahwa media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam bidang kebijakan publik dan kesejahteraan anak. Secara teoretis, konsep "Kabupaten Layak Anak" memperkaya literatur mengenai pendekatan holistik dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di lingkungan lokal. Studi ini menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan, yang sejalan dengan teori partisipasi publik dan hak-hak anak. Melalui Forum Anak Daerah (FAD), penelitian ini menggarisbawahi bahwa partisipasi anak bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai mekanisme nyata untuk memberdayakan anak-anak dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal ini mendukung pandangan bahwa partisipasi yang inklusif dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik.

Adapun secara secara praktis, penelitian ini memberikan panduan konkret bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program Kabupaten Layak Anak. Pengalaman Kabupaten Bandung menunjukkan langkah-langkah praktis seperti analisis data kebutuhan anak, pembentukan forum anak di berbagai tingkatan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta. Penelitian ini juga menyoroti tantangan nyata seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman stakeholder, dan tantangan geografis, serta strategi untuk mengatasinya, seperti advokasi intensif dan sosialisasi. Dengan adanya prestasi dari instansi seperti UPTD Puskesmas Garuda dan RSUD Bandung Kiwari, penelitian ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana fasilitas ramah anak dapat diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi praktis bagi daerah lain yang ingin mengadopsi model serupa untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

Adapun keterbatasan dalam studi ini yakni: pertama, penelitian ini tidak memberikan banyak informasi mengenai evaluasi jangka panjang dari program KLA. Evaluasi longitudinal diperlukan untuk memahami keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari inisiatif ini. Kedua, pada tantangan geografis disebutkan sebagai kendala, studi ini belum memberikan analisis mendetail mengenai wilayah mana yang paling terdampak dan bagaimana strategi spesifik untuk mengatasi tantangan geografis ini. Ketiga, sementara itu ada pengakuan

tentang pentingnya peran sektor swasta, studi ini belum mengeksplorasi strategi spesifik untuk meningkatkan keterlibatan dan kontribusi sektor swasta dalam mendukung program KLA. Keempat, tidak ada analisis biaya yang mendalam mengenai berbagai inisiatif dalam program KLA. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung telah dicanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2024, hal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan anak. Upaya ini terbukti melalui penghargaan yang diterima oleh instansi setempat seperti UPTD Puskesmas Garuda dan RSUD Bandung Kiwari sebagai penyedia layanan ramah anak. Inisiatif ini melibatkan pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung (FAD), yang berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam pengambilan keputusan pembangunan. Partisipasi anak di forum ini memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan seperti partisipasi anak yang masih formalitas, kurangnya pemahaman dari stakeholder, keterbatasan dana, serta tantangan geografis. Penyebaran Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa juga belum merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan berbagai strategi termasuk analisis data kebutuhan anak, pembentukan forum anak di berbagai tingkatan, sosialisasi intensif, dan advokasi lintas sektor.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan peran penting pekerja sosial dalam mendukung pemenuhan hak partisipasi anak melalui pendampingan dan mediasi. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas yang dilakukan pekerja sosial terbukti efektif dalam jangka panjang. Dengan dukungan berbagai pihak termasuk sektor swasta, pemerintah Kabupaten Bandung berupaya memastikan keberlanjutan dan efektivitas program KLA, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal anak-anak.

Bibliography

- Arifin, A. (2019). *Hubungan Pola Asuh Otoritatif dan Lokus Kendali Internal Dengan Kesejahteraan Psikologis Siswa SMA Negeri 12 Medan*. Universitas Medan Area.
- Arifina, A. S., & Afrilia, A. M. (2023). Penguatan Forum Anak Kabupaten Magelang

- Melalui Pelatihan Jurnalisme Seluler. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 184–196.
- Bandung, D. (2024). *Akselerasi Sejumlah Aspek, Bandung Siap Jadi Kota Layak Anak* 2024. Diskominfo Bandung. <https://jabarprov.go.id/berita/akselerasi-sejumlah-aspek-bandung-siap-jadi-kota-layak-anak-2024-12515>
- Bandung, H. K. (2023). *Kota Bandung Optimis Peroleh Predikat Nindya untuk KLA*. Bandung.go.id. <https://www.bandung.go.id/news/read/8115/kota-bandung-optimis-peroleh-predikat-nindya-untuk-kla>
- Cindy Ramadhani Wijaya. (2022). *STRATEGI DAN HAMBATAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Universitas Lampung.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed edisi ketiga*. Alih Bahasa: Achmad Fawaid. In *Pustaka Belajar*.
- Darmayanti, D., & Lipoeto, N. I. (2020). *Gambaran Pemenuhan Hak Anak serta Faktor-Faktor yang Mendukung pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bukittinggi tahun 2019*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4).
- Darsal Zulfakar Dafid, Wa Ode Nadziyran Urufia, Wa Ode Nurhidayati, Muhamad Subhan, & Eky Endriana Amiruddin. (2024). *Evaluasi Program Imunisasi Anak di Wilayah Pedesaan Tantangan dan Solusi*. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 449–460. <https://doi.org/10.62504/4mjwhd56>
- Dewi Septriana Kumalasari. (2024). *Patologi Birokrasi Pelayanan Bansos Di Bagian Kesra Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan*. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 198–213. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1349>
- Faturohman, & Herlina. (2024). *IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA*. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(3), 1–7.
- Hakim, S. A. (2019). *PERAN DAN FUNGSI UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN (UNIFEM) DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI DARFUR 2005-2010* [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/http://dspace.uui.ac.id/123456789/18448>
- Hamudy, M. (2015). *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 149–160.

- <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.149-160>
- Haq, M. I. (2017). Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 16(2), 85. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1172>
- Hastira, M. F. (2024). *Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Nasional di Indonesia Pada Tahun 2018-2022 = The Role of the ASEAN Children's Forum in Encouraging the Fulfillment of Children's Participation Rights through th*. Universitas Hasanuddin.
- Irmawati, N. (2009). *Responsivitas pemerintah Kota Surakarta terhadap perlindungan anak menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)*. Universitas Sebelas Maret.
- Jaenudin. (2024). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(1), 939–944.
- Jaya, N. I. (2019). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- KLA Bandung. (2024). *Kota Bandung Menuju Kota Layak Anak*. KLA Kota Bandung. <https://klakotabandung.id/>
- Lastriana, N. (2021). *KOTA BANDUNG RAIH KOTA LAYAK ANAK KATEGORI MADYA*. Bandung.go.id. <https://www.bandung.go.id/news/read/5609/kota-bandung-raih-kota-layak-anak-kategori-madya>
- Lawado, I. S., & Naimah. (2017). PENEGAKAN HAM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI KEBIJAKAN PARTISIPASI DALAM FORUM ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang 2017*, 5(1), 239–246.
- Lexy J. Meleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Lickona, T. (2022). Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya. In *Bumi Aksara* (hal. 43).
- Lukman, D. M. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DALAM RANGKA PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak

- Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10157–10169.
- Nadilla, S. (2019). PELOKALAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN BERBASIS HAKA SASI MANUSIA PELOKALAN HAKA SASI MANUSIA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN BERBASIS HAKASASI MANUSIA. *Jurnal HAM*, 10(1), 85–98.
- Naibaho, M. A., & Siregar, H. (2023). Kepemimpinan Inklusif Dalam Proses Pembangunan Komunitas Dengan Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Anak Muda. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 18–25.
- Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2024). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN PEMALANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(2), 1–20.
- Nurida, S. M. (2024). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik*. UIN Ar-Raniry.
- Octarra, H., D. N. S., & Ajisuksmo, I. C. (2022). Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja dan Keterlibatan di Masyarakat Indonesia. In *Atma Jaya* (hal. 21).
- Pramono, J. A. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Putra, R. K. (2024). *HAK ASASI MANUSIA (HAM)* (hal. 1–129). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/478>
- Raafiah, F. S. F., Pamungkas, G. S., & S., R. A. D. P. (2024). KOLABORASI PEMERINTAHAN DAN INOVASI KEBIJAKAN MELALUI KETERLIBATAN ANAK MUDA DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 483–492.
- Rahma, A. N. (2024). *Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Bogor*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of*

- Economics and Business*, 7(2), 1461.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Ramadhita, N., & Roychansyah, M. S. (2023). GAMBARAN PEMAHAMAN KOTA SEHAT OLEH KELOMPOK MIDDLE CHILDHOOD. *JURNAL RISET KESEHATAN POLTEKKES DEPKES BANDUNG*, 16(1), 144–157.
<https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v16i1.2488>
- Raya, B. (2023). *Bandung Kota Ramah Anak, Permudah Pembuatan Akta hingga Anggaran Rp120 M untuk Siswa RMP*. terasbandung.com.
<https://terasbandung.com/2023/07/24/bandung-kota-ramah-anak-permudah-pembuatan-akta-hingga-anggaran-rp120-m-untuk-siswa-rmp>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG. *Share: Social Work Journal*, 5(1).
<https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13085>
- Rizki, E. A., Warsah, I., & Jaya, G. P. (2020). Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 207–224.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3947>
- Rossmann, Gretchen, B., & Rallis, S. F. (2012). Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research. In *Thousand Oaks*, CA: SAGE.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28.
- Sumanda, R. (2024). *Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Sumiaty, N. (2021). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL &*

HUMANIORA, 3(04), 56–67.

- Ulfamadani, H. N. (2023). *Peran UNICEF dalam Internalisasi Norma dengan Children Panchayat untuk Mengurangi Kekerasan Anak (Child Abuse) di India = The Role of UNICEF in Internalizing Norm with Children Panchayat in Reducing Child Abuse in India*. Universitas Hasanuddin.
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas. In *Universitas Brawijaya Press*, (hal. 12).
- UNICEF. (2017). CHILD PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNANCE. In *A UNICEF GUIDANCE NOTE Public Finance and Local Governance (PFLG) Social Policy* (hal. 24).
- Vita Putri Oktaviani, & Riswanda. (2024). Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.253>
- Yohana, N. (2018). PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA). *JURKOM: Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 170–179.